

**MANAJEMEN PEMERINTAHAN DINAS TENAGA KERJA KOTA
PEKANBARU DALAM PENYELENGGARAAN TENAGA KERJA
TAHUN 2014**

By: Yuni Erika
Yunie.erika16@gmail.com
Supervisor: Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si
Library of Riau University

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The aimed of this study to seeing how management of government Offices of Manpower in the operation of workforce in 2014. As for what is meant by management of government is the process of government activity which is generally associated with effort to exercise the power of government by implementing management functions consisting of planning, organizing, directing, coordinating and controlling. This study used qualitative research methods with a descriptive research can be interpreted as troubleshooters which described by describing situation the subject of research with the facts visible and then connected using the existing theories.

The results of research showed that management of government Offices of Manpower in the operation of labor in 2014 is already well underway. Of the planning process, Offices of Manpower prepare and make a program based on the needs of the Pekanbaru's workforce. In terms of organizing, every employee Offices of Manpower has been working in accordance with his duties. In the directing, Offices of Manpower implementing the program has been run in accordance with term of reference. In term of coordination, Offices of Manpower in collaboration with Private Employment Training Institute and have good mutual relations. And the last is controlling, Offices of Manpower go directly monitor the extent of success of the program.

In this research, budget constraints, limited education job seekers, limited facilities and infrastructure and than less participation job seekers becoming a problem of Offices of Manpower in reducing unemployment.

Keywords : Management of Government, Offices of Manpower, Manpower, Unemployment

1. PENDAHULUAN

Kata pengangguran sudah tidak asing lagi kita dengar, banyak terjadi pengangguran dimana-mana. Sebuah lembaga pendidikan tidak dapat menjamin berkurangnya pengangguran, bahkan banyak lulusan sarjana yang menganggur. Jadi dapat dikatakan bahwa pendidikan yang tinggi tidak dapat menjamin seseorang mendapat pekerjaan.¹ Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang dialami oleh banyak negara. Begitu seriusnya masalah ini sehingga dalam setiap rencana-rencana pembangunan ekonomi masyarakat selalu dikatakan dengan tujuan untuk menurunkan angka pengangguran.²

Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Apabila pengangguran dibiarkan tentunya akan berdampak negatif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Bila tingkat pengangguran tinggi akan menyebabkan tingkat kemakmuran rendah, bahkan dapat membahayakan stabilitas Negara.

Adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan membuat pemerintah memiliki kewajiban untuk memperkecil angka pengangguran. Karena besarnya angka pengangguran dapat dikatakan sangat penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan

ekonomi. Hal ini dikarenakan pengangguran merupakan indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan akibat dari tingkat pembangunan ekonomi.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi peningkatan jumlah pengangguran. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas Tenaga Kerja memiliki tugas pokok membantu walikota di bidang pengaturan tenaga kerja.

Namun pada kenyataannya angka pengangguran di Riau cukup besar, bahkan pada tahun 2014 mencapai 176.762 jiwa. Tabel dibawah ini menyajikan peringkat jumlah pengangguran terbanyak di Riau tahun 2014.

¹ Sonny Sumarsono. Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009. Hal. 259

² Ibid, Hal. 249

Tabel 1.1 Peringkat jumlah pengangguran terbanyak di Provinsi Riau Tahun 2014

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Tahun 2015

Berikut tabel persentase pengangguran di Kota Pekanbaru tahun 2013-2014:

Tabel 1.2 Persentase Pengangguran di Kota Pekanbaru Tahun 2013-2014

Tahun	Jumlah Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	Persentase (%)
2013	29.394	442.105	6.65
2014	41.363	449.694	9.20

Sumber: Data Olahan 2015

Tabel diatas menjelaskan terjadinya peningkatan jumlah pengangguran sebanyak 11.969 jiwa pada tahun 2014 hanya dalam satu tahun saja. Dalam persentasenya, tahun 2013 hanya 6.65 persen kemudian pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 9.20 persen.

2. RUMUSAN MASALAH

Atas dasar latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diajukan dalam bentuk pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana manajemen pemerintahan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan tenaga kerja tahun 2014 ?

2. Apa saja kendala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dalam

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pengangguran (Jiwa)
1	Pekanbaru	41.363
2	Kampar	20.028
3	Rokan Hilir	18.884
4	Bengkalis	18.829
5	Rokan Hulu	15.895
6	Indragiri Hilir	12.472
7	Dumai	11.479
8	Kepulauan Meranti	10.273
9	Kuansing	8.434
10	Indragiri Hulu	6.955
11	Siak	6.235
12	Pelalawan	5.915
	Jumlah	176.762

penyelenggaraan tenaga kerja tahun 2014 ?

3. PEMBAHASAN

3.1 Manajemen Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Tenaga Kerja Tahun 2014

3.1.1 Planning (Perencanaan)

Dalam kegiatan manajemen hal yang pertama kali dilakukan untuk mencapai tujuan adalah perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen dan bersifat mutlak bagi pelaksanaan manajemen yang baik.

Perencanaan disini tidak lain merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta cara-

cara untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan juga dilakukan untuk menentukan tujuan organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru membuat suatu perencanaan dalam penyelenggaraan tenaga kerja

3.1.2 Organizing (Pengorganisasian)

Dalam pelaksanaan manajemen, setelah fungsi perencanaan maka selanjutnya harus dijabarkan adalah fungsi pengorganisasian. Bagaimanapun baiknya sebuah perencanaan, tetapi bila dilaksanakan tanpa terorganisasi dengan baik, maka perencanaan tersebut tidak akan dapat mencapai sasaran yang ditentukan.³

Dalam penyelenggaraan tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru memiliki pengorganisasian untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas dengan baik. Setelah mengetahui apa saja yang menjadi pengorganisasian, selanjutnya penyelenggaraan tenaga kerja dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap bidang dengan cara pembagian kerja dan koordinasi.

3.1.3 Directing (Pelaksanaan)

Pelaksanaan dapat diartikan sebagai implementasi dari setiap perencanaan. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah perencanaan yang telah disusun secara matang dan terperinci. Karena tercapainya tujuan bukan hanya tergantung pada perencanaan dan pengorganisasian yang baik melainkan juga tergantung kepada pelaksanaan dari perencanaan tersebut.

Dalam penyelenggaraan tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru harus memiliki komunikasi yang efektif dan efisien. Komunikasi dalam penelitian ini merupakan suatu proses bagaimana pimpinan mengkomunikasikan rencana atau perencanaan yang telah dibuat.

3.1.4 Coordinating (Koordinasi)

Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga disatu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya. Sementara pada sisi lain, yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain.

Koordinasi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dengan lembaga terkait dapat dikatakan sudah baik karena adanya hubungan timbal balik antara Dinas dengan pihak LPKS dengan tujuan tercapainya tujuan bersama.

3.1.5 Controlling (Pengawasan)

Pengawasan dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah kemungkinan penyimpangan terhadap perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan yang baik didasari pula oleh adanya perencanaan yang baik.

Dalam penyelenggaraan tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru juga memberikan pengawasan untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan tenaga kerja tersebut. Kegiatan pengawasan

³ Ibid, Hal.165

dalam manajemen pemerintahan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan, membandingkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, membandingkan pelaksanaan dengan standar (perencanaan) dan melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan atau ketidaksesuaian agar pelaksanaan dan tujuan berjalan sesuai dengan rencana.

3.2 Kendala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Dalam Penyelenggaraan Tenaga Kerja Tahun 2014

3.2.1 Keterbatasan Pendidikan Pencari Kerja

Dalam dunia kerja sangat dibutuhkan pendidikan yang baik, karena dengan memiliki pendidikan yang baik akan memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik serta memiliki tingkah laku yang baik pula. Dalam penyelenggaraan tenaga kerja, kendala yang dihadapi adalah kurangnya pendidikan yang dimiliki para pencari kerja.

Kendala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan Tenaga Kerja tahun 2014 adalah keterbatasan pendidikan pencari kerja, dimana pendidikan sangat penting peranannya dalam penyerapan tenaga kerja.

3.2.2 Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru tidak memiliki Balai Latihan Kerja sendiri untuk melakukan pelatihan keterampilan. Balai Latihan Kerja masih dibawah naungan

provinsi. Sarana dan prasarana yang selama ini digunakan untuk melakukan pelatihan keterampilan berasal dari kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

3.2.3 Kurangnya Partisipasi Pencari Kerja

Kurangnya partisipasi pencari kerja merupakan kendala yang terakhir Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan tenaga kerja tahun 2014. Proses penyelenggaraan tenaga kerja tidak lepas dari peran serta pencari kerja itu sendiri. Sedangkan partisipasi pencari kerja pada tahun 2014 menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

- a. Manajemen pemerintahan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dilihat dari perencanaannya sudah baik, karena perencanaan program disusun dan diusulkan dengan melihat kebutuhan dunia kerja di Kota Pekanbaru pada saat ini.
- b. Dilihat dari segi pengorganisasian, pembagian kerja yang dilakukan sudah menuju kearah yang lebih baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Setiap pegawai Dinas Tenaga Kerja sudah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, sebelum mengadakan

- kegiatan atau pelatihan, diadakan rapat terlebih dahulu untuk lebih memastikan tugas masing-masing pegawai terkait.
- c. Dari segi pelaksanaan, Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru sudah berjalan sesuai dengan kerangka acuan kerja yang disusun pada proses perencanaan dan sesuai perintah atau pengarahan dari pihak-pihak terkait guna terciptanya kerja yang produktif.
 - d. Dari segi koordinasi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dengan lembaga terkait, dapat dikatakan sudah baik karena adanya hubungan timbal balik antara Dinas dan lembaga pelatihan tersebut dengan tujuan tercapainya tujuan bersama.
 - e. Dari segi pengawasan, Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru sudah melaksanakan pengawasan dengan baik. Terbukti dengan membandingkan setiap hasil kegiatan program dan kegiatan dengan perencanaan awal untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan program dan kegiatan itu berjalan serta program dan kegiatan disusun berdasarkan kebutuhan dunia kerja agar hasil yang ingin dicapai sesuai dengan perencanaan.

4.2 Saran

1. Seharusnya pemerintah Kota Pekanbaru mendirikan Balai Latihan Kerja sendiri, karena selama yang menyediakan sarana dan prasarana hanya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS).
2. Dalam kendala partisipasi pencari kerja, seharusnya para pencari mengikuti berbagai pelatihan atau program yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja, terutama pencari kerja lulusan SMA kebawah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Arfida. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Bakir, Zainabdan Chris Manning. 1984. *Angkatan Kerja di Indonesia (Partisipasi, Kesempatan, dan Pengangguran)*. Jakarta: CV. Rajawali
- Efendi, Sofian. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES. Hal. 207
- Hasibuan, Melayu S.P. 1995. *Manajemen Personalia dan Produktivitas Kerja*. Yogyakarta: BPF
- Nawawi, Hadari. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: GadjahMada University Press

- Siswanto. 2011. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiarto, Eko. 2013. *Master EYD Edisi Baru*. Yogyakarta: Suaka Media
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Sumarsono, Sonny. 2009. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suroto. 1992. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*. Yogyakarta: GadjahMada University Press.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Wiludjeng, Sri SP. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang**
 Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
- <http://www.riapos.co/73685-berita-pencari-kerja-pilih-pilih,-pengangguran-meningkat.html> (diakses tanggal 7 November 2015)
- <http://ayurohil.blogspot.co.id/2015/10/penyebab-dan-solusi.html?m=1> (diakses tanggal 7 November 2015)
- <https://tesisdisertasi.blogspot.co.id/2010/03/teori-kebijakan-publik.html?m=1> (diakses tanggal 1 Februari 2016)
- <http://perencanaankota.blogspot.co.id/2010/01/beberapa-teori-tentang-implementasi.html?m=1> (diakses tanggal 1 Februari 2016)
- <http://chikacimoet.blogspot.co.id/2013/02/pemberdayaan-masyarakat.html?m=1> (diakses tanggal 17 Februari 2016)
- <http://gungzetiadji.blogspot.co.id/2012/10/teori-organisasi.html?m=1> (diakses tanggal 16 Maret 2016)
- <http://iqbalmudzakir.blogspot.co.id/2012/09/apa-itu-organisasi.html?m=1> (diakses tanggal 16 Maret 2016)
- http://2frameit.blogspot.com/2011/11/manajemenpemerintahan.html?m=1&ei=ZwvWv_Zy&lc=id-ID&s=1

Sumber Lain

- <http://bps.go.id/Subjek/view/id/6> (diakses tanggal 2 November 2015)
- <http://www.zonasiswa.com/2014/12/pengangguran-pengertian-jenispenyebab.html?m=1> (diakses tanggal 6 November 2015)
- <http://www.antarariau.com/berita/19727/pekanbaru-dibayangi-ledakan->